



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)



TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia – Nya maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 ini merupakan bagian dari kegiatan, program dan kebijakan. Selain itu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dibuat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu 2021 - 2026

Kami menyadari RENSTRA yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pengembangan dan penyempurnaan RENSTRA ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan "**Good Governance**" di lingkungan internal khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Perikanan	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23

BAB III PEMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	31
3.3. Telaah Rentra Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....	35
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan.....	45
--	----

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi.....	53
--------------------	----

5.2. Kebijakan	56
----------------------	----

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan	63
---	----

6.2. Pendanaan.....	70
---------------------	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perikanan	72
--	----

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan.....	76
----------------------	----



PENDAHULUAN

.1.1 Latar Belakang

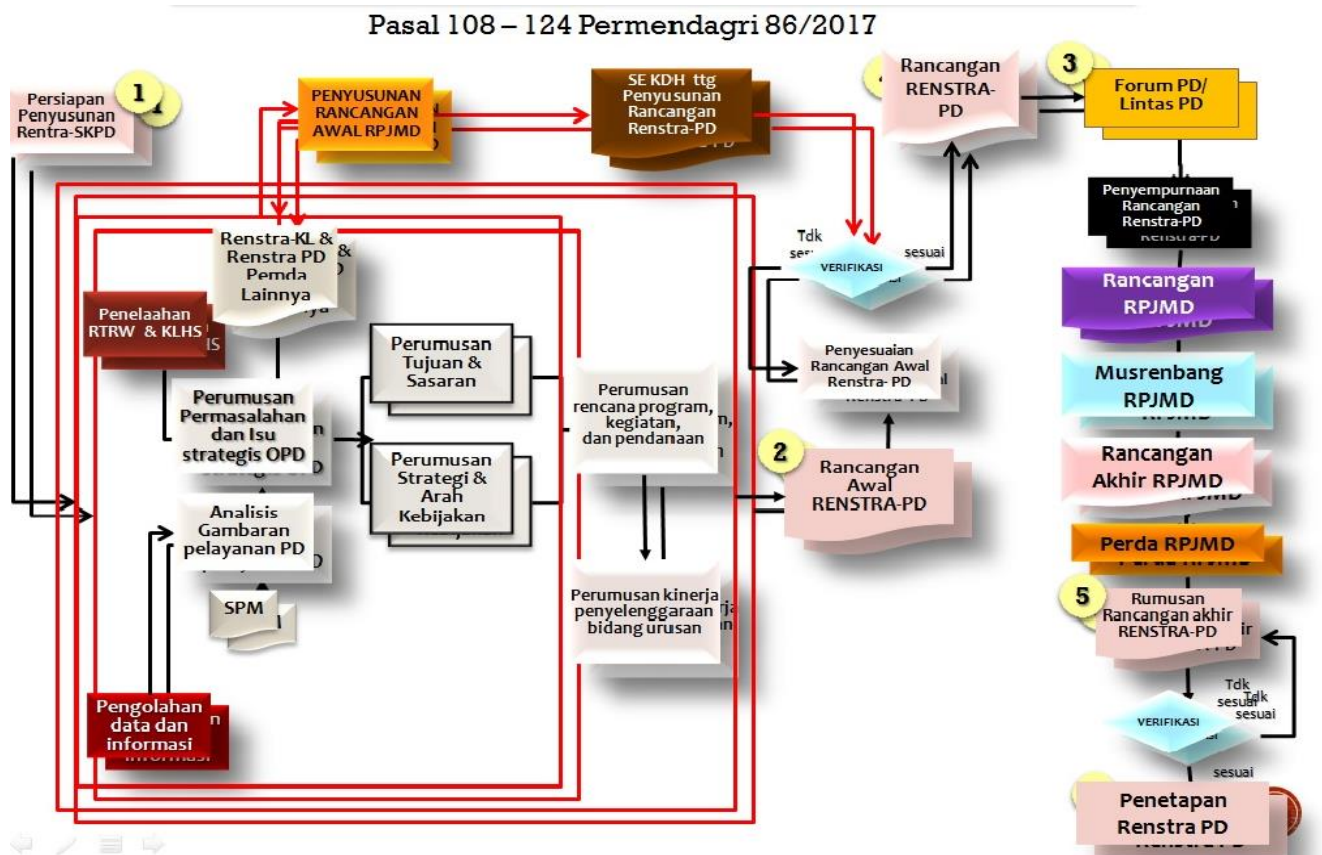
Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Perencanaan adalah upaya mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
- c. Penyusunan Rancangan Renstra
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra
- f. Penetapan Renstra Dinas Perikanan

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara penyusunan Renstra PD

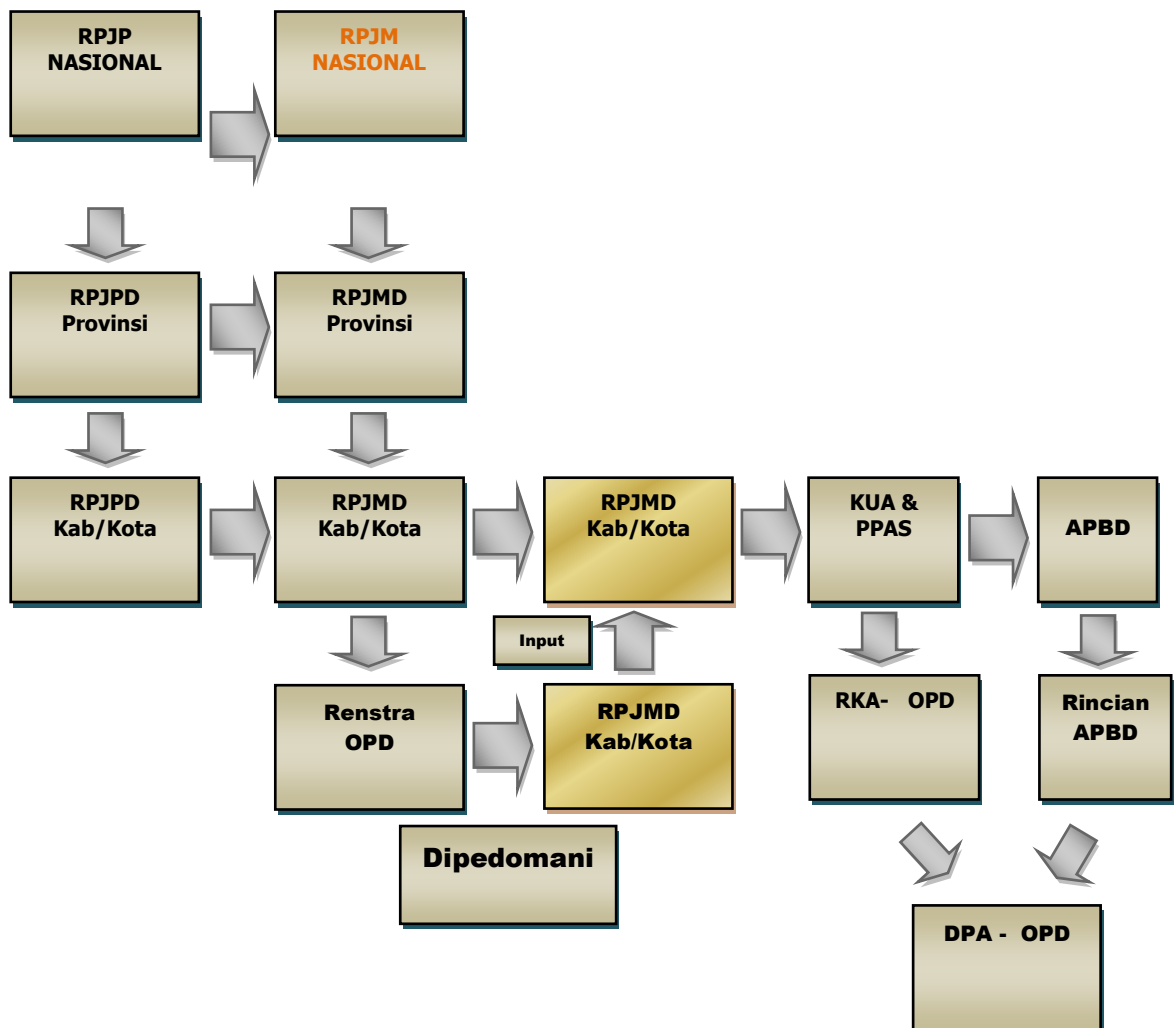


Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan perikanan dan kelautan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Renstra Dinas tingkat Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki Urgensi yaitu antara lain :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD.
2. Dasar Penilaian Kinerja Kepala SKP

Gambar 2.
Bagan Alir Hubungan Dokumen Perencanaan Startegis
dengan Dokumen Lainnya



.1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020

- tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;

25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

.1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan resmi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis sumberdaya lokal;
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Memungkinkan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan komitmen pada kegiatan di masa mendatang.

.1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

	PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perikanan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Perikanan, Pengelolaan barang milik/Kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, penyampaian laporan secara periodik serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Tupoksinya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tanggal 7 November 2016, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil
 - a. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil
Pembudidayaan Ikan
5. Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Perikanan
 - b. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

(1) Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kerarsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil.

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil adalah membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik;
- f. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan Budidaya.

Tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya adalah membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang

pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan pernbudidaya kecil;
- d. Pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perikanan Budidaya secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (K-TPI)

Tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan perikanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penguatan Kelembagaan perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan perikanan;
- d. Pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

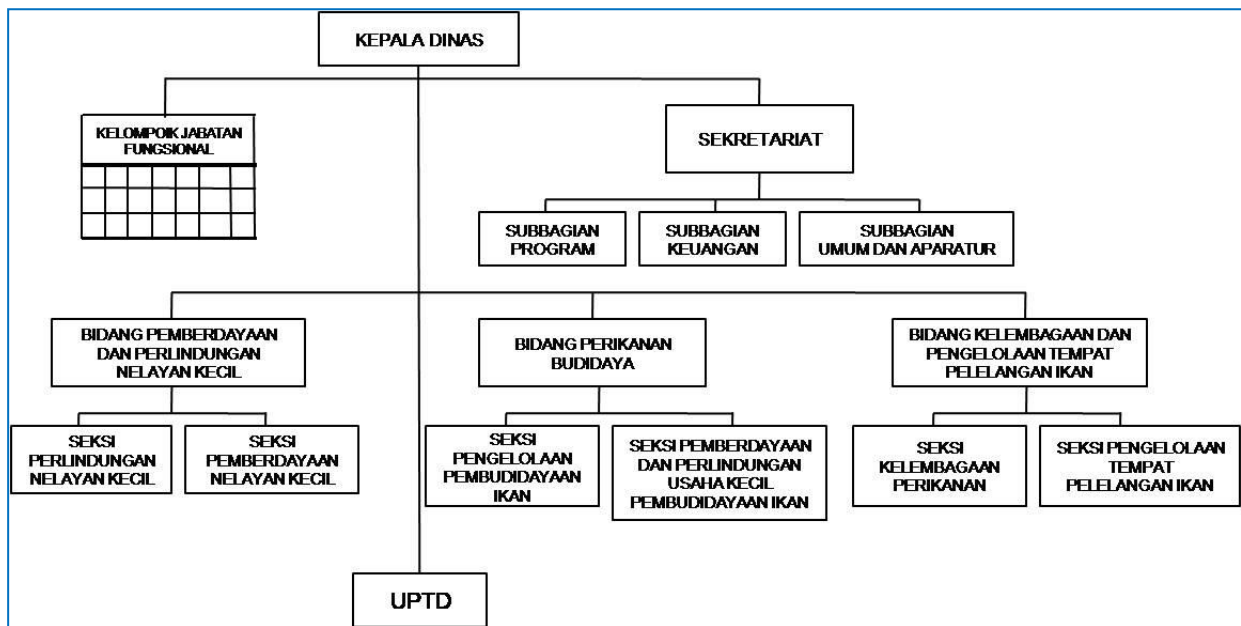
(6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perikanan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 3.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu



2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 85 orang pegawai terdiri dari 36 PNS, 48 Tenaga Kontrak dan 1 orang Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil/CPNS dengan jumlah 36 orang terdiri dari 31 orang di Kantor Dinas Perikanan dan 5 orang di UPT BI Kelansin.
 - 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:
 - a. Golongan I = 2 orang
 - b. Golongan II = 5 orang
 - c. Golongan III = 25 orang
 - d. Golongan IV = 3 orang
 - 2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a. S2 = 10 orang
 - b. S1 = 10 orang
 - c. D3 = 2 orang
 - d. S L T A = 11 orang
 - e. S L T P = 2 orang

3) Dari segi Jabatan Struktural/ Eselon adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II = 1 Orang
- b. Eselon III = 3 Orang
- c. Eselon IV = 9 Orang

2. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang berjumlah 48 Orang Terdiri dari; Tenaga Administrasi Perkantoran 26 Orang, Petugas Kebersihan Kantor 2 Orang, Supir/Motoris 1 Orang, Petugas BBI 9 Orang, Petugas TPI 9 Orang, Petugas Biota Langka 1 Orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu 2 Orang, Dengan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

- SARJANA (S1) = 18 Orang
- SARJANA (D3) = 8 Orang
- S L T A = 22 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana yang ada Dinas Perikanan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Tanah	5
2. Instalasi PDAM/ PLN/ Telp./Jaringan	8
3. Bangunan :	
a. Gedung Kantor	20
b. Rumah Dinas	2
c. Rumah Tamu (Gusest House)	1
d. Mess, Pos Penyuluh Perikanan, dll	23
e. Kolam/Bak Ikan	8
f. Rumah Packing	1
g. Gedung Pertemuan	2

h. Tempat Pelelangan Ikan Permanen	1
4. Alat Angkut :	
a. Mobil	5
b. Sepeda Motor	37
c. Speed Boat	7
5. Alat Perikanan :	
a. Tabung Oksigen	6
b. Tag Reader	1
c. Mesin pencetak pelet	2
d. Fry counter	1
e. Mesin Pencetak Pakan	2
f. Aquarium/ Wadah Benih	78
g. Pompa Air	5
h. DO Meter	2
i. pH Tester	8
j. pH meter	11
k. Hyblow	13
6. Peralatan Meubelair :	
a. Meja kerja	71
b. Meja Rapat (Kecil/ Besar)	10
c. Meja/ Kursi Tamu	2
d. Kursi Rapat/ Kursi Kerja	40
e. Whiteboard/ Papan tulis	4
f. Rak Buku Perpustakaan	37
g. Lemari arsip	16
7. Peralatan Kantor :	
a. Komputer	1
b. Laptop, Notebook	47
c. Hardisk Eksternal	1
d. Proyektor/ Infocus	4
e. Printer	53
f. Alat Pendingin (AC)	13
g. Kipas Angin	9
h. Brankas	1
i. Mesin Fotocopy	2
j. UPS	1
8. Alat-alat Studio	

a. Kamera Digital + Asesoris	11
b. Handycam	2
c. CCTV	22
d. Solar Home System	7
e. Roll Banner	10
9. Alat ukur	
a. GPS	7

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif, memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pencapaian target kinerja selama periode 2021 – 2026 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai beriku

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Akuntabilitas Kinerja Dinas	BB	C	C	CC	B	BB	C	C	CC	B	BB	100	100	100	100	100
2.	Produksi Perikanan																
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)	42,093	31.495	31.439	40.415	40.050	42,093	31.495	31.439	40.415	40.050	42,093	100	100	100	100	100
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)	32.266	17.923	24.665	25.365	24.414	32.266	17.923	24.665	25.365	24.414	32.266	100	100	100	100	100
	c. Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)	11.359	14.202	15.679	10.296	10.893	11.359	14.202	15.679	10.296,73	10.893,91	11.359,33	100	100	100	100	100
3	Konsumsi Ikan/kapita (%/tahun)	40,00	37,00	38,15	38,50	39,00	40,00	37,00	38,15	38,50	39,00	40,00	100	100	100	100	100

Secara garis besar berdasarkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua tugas pokok yakni Administrasi Dinas Perikanan dan teknis sektor perikanan. Tupoksi Dinas Perikanan tertuang ke dalam tujuan Dinas Perikanan. Adapun tujuan Dinas Perikanan terbagi menjadi dua antara lain :

Tujuan 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas

Indikator utama pada bidang Sekretariat adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sejak diberlakukan Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2018 Dinas Perikanan mendapatkan nilai yang sangat rendah yakni CC.

Seiring berjalan dengan melakukan perbaikan pada perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Dinas Perikanan mulai naik secara perlahan hingga tahun 2020 mendapatkan predikat BB. Selain itu hal ini didukung pada kegiatan pelayanan publik Dinas Perikanan.

Terdapat 3 dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat telah menyediakan beberapa jenis pelayanan, yaitu :

1. Pemberian Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Pemberian Surat Pembudidayaan Ikan (SBI)
3. Pelayanan Penjualan Benih Ikan

Pada pelayanan penjualan benih ikan terdapat 3 cara memperoleh benih ikan yang dapat dipilih oleh masyarakat atau pembeli, yaitu :

- Pelayanan Secara Langsung (Pesanan diambil di UPT BI Kelansin)
- Pelayanan Secara Daring (Pesanan diambil di UPT BI Kelansin)
- Pelayanan Jasa Angkut Benih (Pesanan diantar ke lokasi)

4. Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat Ikan di TPI

4 jenis pelayanan tersebut hingga tahun 2020 terus dioptimalkan guna meningkatkan kepuasan masyarakat. Sehingga pada tahun 2020 Dinas

Perikanan masih pada kategori hijau dalam pelayanan publik yang dijalankan.

Tujuan 2 : Meningkatnya pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan)

Dinas Perikanan harus mengelola potensi Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu guna mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Hal ini senada dengan Visi Misi Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kapuas Hulu. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutan masih sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kapuas Hulu seperti karet, sawit, ikan arwana, ikan konsumsi perairan umum, keratom, madu dan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan ada kenaikan di tahun 2019 dikarenakan permintaan ikan konsumsi masih tinggi, akan tetapi di tahun 2020 mulai terjadi penurunan. Hal tersebut diatas dikarenakan bukan karena produksi menurun tetapi dikarenakan aktivitas mulai dibatas karena mulai terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia hingga ke Kapuas Hulu.

Meskipun ada penurun sedikit, ternyata produksi masih tetap berjalan dan dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang dihitung oleh BPS Kapuas Hulu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Kenaikan PDRB di sektor perikanan didukung dari produksi perikanan di Kapuas Hulu. Produksi perikanan di Kapuas terbagi menjadi tiga antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya dan hasil pengolahan ikan. ketiga produksi tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. meskipun kenaikan tidak signifikan. Hal ini akan berdampak pada pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

Ketiga produksi tersebut merupakan indikator utama (IKU) pada Dinas Perikanan yang tertuang kedalam sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya pendapatan nelayan
2. Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan
3. Meningkatnya pendapatan pengolah

Adapun capaian selama tahun 2016 – 2020 dapat dijelaskan dibawah ini :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Pendapatan Nelayan

Tabel 2.2
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Tahun Kabupaten Kapuas Hulu

Produksi	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	31.494,71	31.439,01	40.415,00	41.050,42	25.093,00

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020



Faktor penyebab penurunan produksi perikanan tangkap antara lain perubahan iklim (global warming) tidak menentu sehingga produksi ikan menurun. Selain itu penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih banyak, rendahnya kesadaran tentang zona pemasangan alat tangkap dan pengaturan waktu tangkap, rendahnya

kesadaran tentang pengaturan waktu tagkap, kerusakan lingkungan sumber daya ikan serta mutu produksi rendah.

Menurunnya produksi ikan air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu juga berdampak terhadap penurunan produksi perikanan di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pemasok ikan air tawar terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, tidak kurang dari 70% ikan dari kabupaten Kapuas Hulu baik berupa ikan segar maupun dalam bentuk olahan dipasok untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ikan bagi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Adapun potensi perikanan tangkap terdapat di 9 (Sembilan) Kecamatan yang memiliki hasil tangkapan baik sungai, danau maupun anak sungai. Adapun produksi berdasarkan tahun 2020 sebesar 25.230,253 Ton tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Produksi Ikan Perairan Umum Berdasarkan Potensial Tangkapan
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
1	Putussibau Utara	522,24	522,24	440,53	440,53	-
2	Putussibau Selatan	612,27	612,27	512,40	512,40	-
3	Bika	1.648,98	1.648,98	1.373,01	1.373,01	756.908
4	Kalis	-	-	-	-	-
5	Mentebah	-	-	-	-	-
6	Boyan Tanjung	-	-	-	-	-
7	Pengkadan	-	-	-	-	-
8	Hulu Gurung	-	-	-	-	-
9	Seberuang	-	-	-	-	-
10	Semitau	1.965,35	1.909,65	2.192,90	2.192,90	-
11	Suhaid	3.950,63	3.950,63	8.550,08	8.550,08	2.523.025
12	Selimbau	3.535,43	3.535,43	5.042,79	5.042,79	5.550.656
13	Jongkong	2.179,35	2.179,35	4.399,77	4.399,77	3.279.933
14	Bunut Hilir	7.839,56	7.839,56		10.320,35	4.541.446
15	Bunut Hulu	-	-	-	-	-
16	Embaloh Hilir	4.576,13	4.576,13	3.898,08	3.898,08	3.027.630
17	Embaloh Hulu	327,93	327,93	268,56	268,56	-
18	Batang Lupar	1.496,66	1.496,66	1.185,52	1.185,52	3.027.630
19	Badau	1.491,46	1.491,46	1.188,64	1.188,64	2.018.420

NO	KECAMATAN	2016 (Ton)	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
20	Empanang	50,60	50,60	41,44	41,44	
21	Puring Kencana	-	-	-	-	-
22	Silat Hilir	1.009,44	1.009,44	764,48	764,48	504.605
23	Silat Hulu	288,68	288,68	236,44	236,44	-

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan mungkin mampu diawasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu apalagi dengan segala keterbatasan yang ada baik dana, personil maupun sarana dan prasarana sehingga keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan kabupaten Kapuas Hulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya.

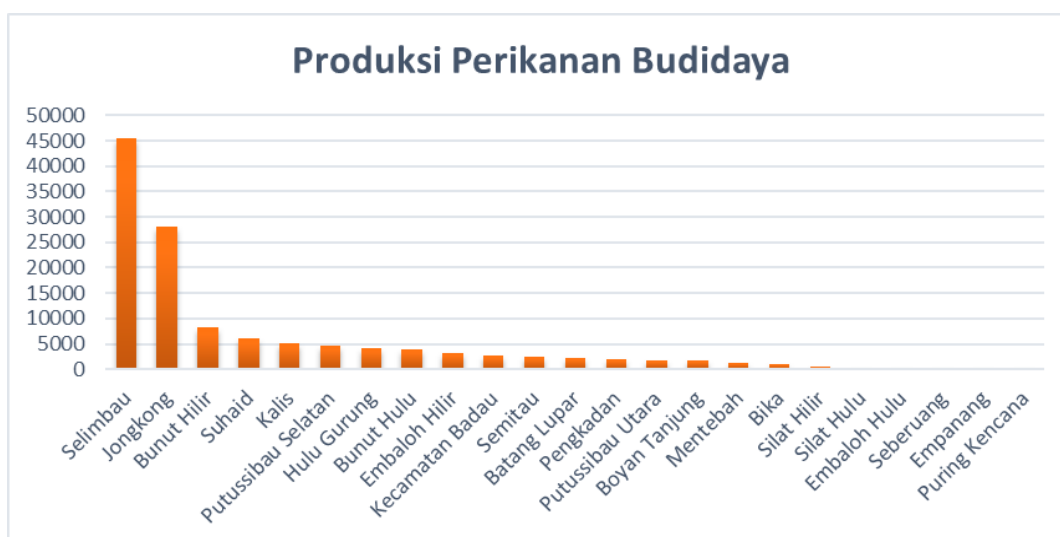
Kehadiran dan existensi Kelompok Pengawas Swadaya (POKMASWAS) bidang perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan sangat besar manfaatnya dan sangat membantu pemerintah. Pokmaswas dengan kearifan lokalnya yang tumbuh dan terbentuk karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlangsungan sumber daya ikan dan lingkungan perairan umum daratan nya dirasakan lebih tepat, cepat, efektif, efesien dan lebih murah dibandingkan dengan pengawasan oleh aparat pemerintah, demikian juga halnya jika dibanding dengan penerapan hukum positif, terkecuali terhadap kasus-kasus besar yang dilakukan oleh penduduk luar desa/kecamatan seperti kasus penyetruman. Terdapat 22 Pokmaswas yang sudah terbentuk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang tersebar di 8 Kecamatan di Kapuas Hulu. *Data terlampir*

Potensi ikan di Kapuas Hulu bukan hanya ikan konsumsi namun ikan hias seperti ikan arwana sudah dikenal mendunia tinggal

bagaimana kita mengemas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk produksi olahan hasil perikanan juga memiliki nilai yang cukup ekonomis untuk dijadikan usaha bagi warga Kapuas Hulu sehingga sub sektor perikanan agar diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan di kolam, pagong, dan keramba serta bantuan fasilitas penangkapan ikan di perairan sungai dan danau guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan produksi daerah serta menunjang kebutuhan bahan baku industri rumah tangga dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan

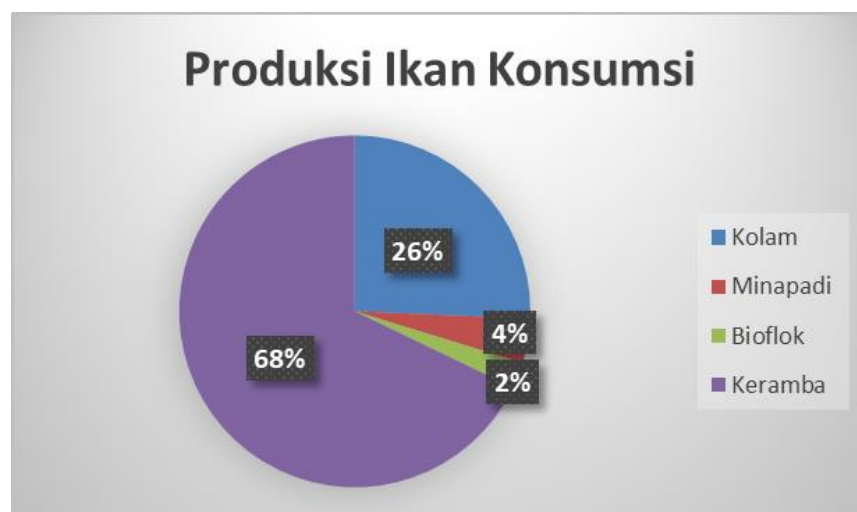
Potensi budidaya ikan di tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Selimbau, Jongkong, Bunut Hilir, Suhaid, Kalis, Putussibau Selatan, Hulu Gurung, Bunut Hulu, Embaloh Hilir, Semitau, Badau, Batang Lupar, Bika, Pengkadan dan Putussibau Utara merupakan kecamatan potensial produksi ikan konsumsi dan ikan hias seperti pada grafik produksi perikanan budidaya tahun 2016 hingga 2020 dibawah ini.



Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Berdasarkan hasil pemetaan potensi budidaya air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 yang telah dilakukan bahwa budidaya ikan air tawar di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan masyarakat hampir di setiap kecamatan berupa budidaya ikan dalam

kolam dengan jumlah 4.797 petak (285,12 hektar), kolam arwana berjumlah 1.637 petak (116,5 hektar) dan karamba sebanyak 7.718 unit (197.848 m²), serta budidaya ikan di sawah bersama padi (minapadi) dengan luas 167 hektar. Di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, luas total kolam yang ada diperkirakan sekitar 285,12 hektar. Kecamatan Suhaid memiliki kolam paling luas, yaitu sekitar 25,51 hektar (8,95% dari seluruh kolam di Kapuas Hulu), kemudian diikuti Kecamatan Jongkong dengan luas kolam 22,44 ha (7,87%), Kecamatan Semitau 22,31 ha (7,82%). Sisanya wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki luas kolam 5-20 hektar. Setiap pembudidaya memiliki 1–3 unit kolam dan ukuran kolam yang dimiliki oleh pembudidaya cukup bervariasi meskipun tidak begitu besar yaitu antara 450 dan 1000 m².



Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Perairan umum yang potensial dengan luas 233,03 hektar adalah 58.250 unit karamba dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.560 orang. Budidaya ikan dalam keramba di Kapuas Hulu cukup banyak dan tersebar di seluruh Kecamatan yang memiliki perairan umum. Kecamatan Selimbau memiliki keramba yang paling banyak, yaitu sekitar 1.782 unit (63.868 m²). Kemudian diikuti Kecamatan

Jongkong yang memiliki keramba sebanyak 1682 unit dengan luas 48.968 m², dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Putussibau Utara.

Secara produksi Kecamatan Jongkong memiliki produksi ikan yang paling tertinggi. Hal ini dikarenakan penjualan ikan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongkong yang bersumber dari Kecamatan Selimbau, Jongkong dan Suhaid. Produksi kedua terbanyak di Kecamatan Bunut Hilir, Selimbau dan Suhaid.

Potensi lahan budidaya air tawar yang tersedia di Kabupaten Kapuas cukup besar dengan total luas 4.126,38 hektar. Potensi budidaya tersebut terdiri atas potensi budidaya minapadi/kolam sebesar 2.115,5 ha. Dari dari pementaan terlaksanannya pengembangan kawasan budidaya dengan pembangunan minapadi baru terealisasi pada tahun 2016 dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap tahunnya ditargetkan 1 ha, namun realisasi di tahun 2020 seluas 3,5 ha. Sehingga dari 4 Kecamatan tersebut sudah mencapai 7,3 ha di tahun 2020.

Sebagai pendukung ketersediaan benih ikan di Kapuas Hulu, UPT Balai Benih Kelansin. Selama tahun 2020, UPT - Benih Ikan (BI) Kelansin Dinas Perikanan sudah melakukan penjualan benih hasil produksi sendiri sebanyak 323,885 ekor. Distribusi benih ada yang tersebar langsung di Kabupaten Kapuas Hulu dan ada juga di Kabupaten Sintang, baik yang diambil secara langsung oleh pembeli yang datang ke UPT - Benih Ikan (BI) Kelansin maupun pembeli yang meminta layanan jasa pengantaran sampai ke lokasi.

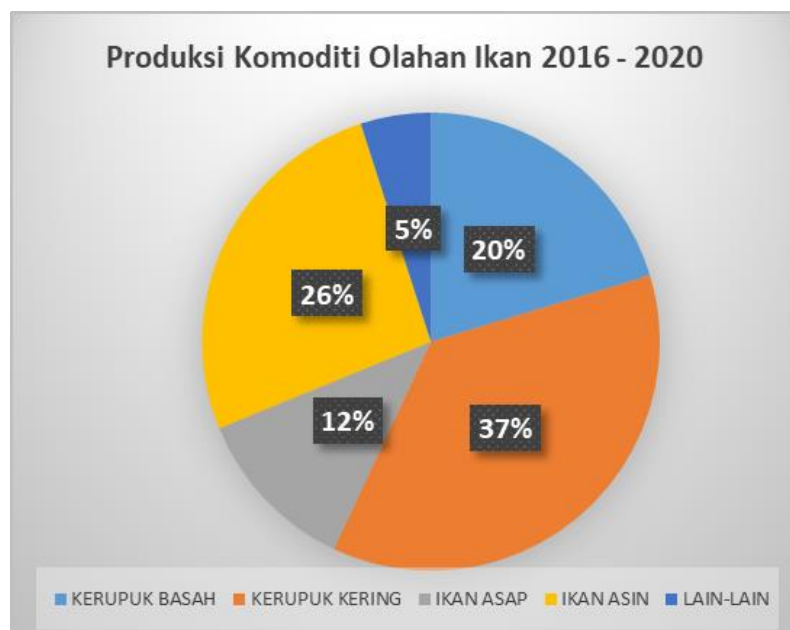
Selain UPT BI, Pembudidaya Mandiri dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebanyak 3 unit UPR yang masih aktif hingga saat ini juga membantu dalam penyediaan benih. Dari total 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, ada sebanyak 15 Kecamatan yang menjadi lokasi distribusi benih, yaitu Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Kalis, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung,

Kecamatan Silat Hulu, Kecamatan Pengkadan, Kecamatan Jongkong, Kecamatan Selimbau, Kecamatan Suhaid, Kecamatan Semitau, Kecamatan Silat Hilir, Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Badau.

Ada sebanyak 9 jenis benih ikan yang sudah didistribusikan selama tahun 2020 yaitu jelawat, patin, gurame, nila merah, mas, lele, arwana, biawan, dan tengadak. Dari kesembilan jenis ikan ini, benih patin yang paling banyak didistribusikan yaitu 40,8% dari total benih kemudian nila merah sebanyak 38,9%, jelawat 9,2%, gurame 6,4% dan ikan lainnya sebanyak 4,7% dari total benih yang sudah dijual selama tahun 2020.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan pengolah

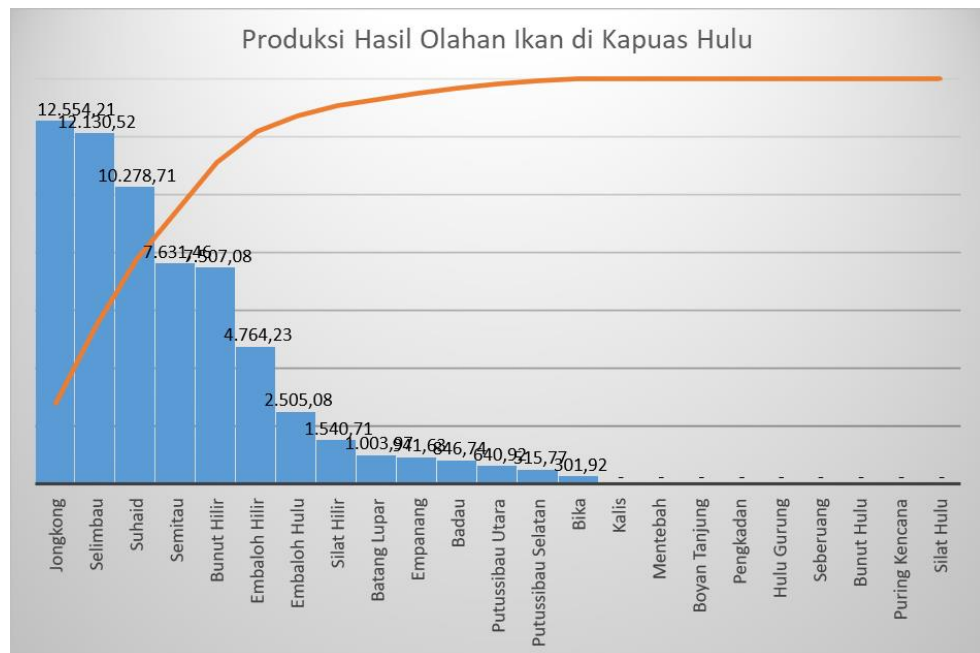
Kabupaten Kapuas terkenal dengan produk olahan ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin dan ikan asap. Produk olahan tersebut sudah terjual di berbagai daerah dari pulau Kalimantan hingga pulau Jawa. Terutama kerupuk basah paling banyak diminati masyarakat. Bahan baku pembuatan ikan tersebut masih bergantung pada produksi ikan tangkap.



Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Dari data analisis diatas produk kerupuk kering masinh mendominasi hasil olahan ikan dari Kapuas Hulu sebesar 37 %, disusul ikan asin 26%, kerupuk basah 20%, ikan asap 12 % dan produk lainnya 5 % seperti pakasam, peja, jukot dan ruset.

Namun dalam pengembangan produk olahan hasil ikam masih mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya modal usaha, rendahnya penguasaan teknologi, diversifikasi masih minim, kualitas olahan masih relatif rendah dan belum bervariasi, pemasaran masih bersifat lokal, pengemasan masih sederhana dan sebagian produk belum besertifikat halal dari MUI.



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Dari data tahun 2019 Kecamatan Jongkong merupakan penghasil hasil olahan ikan yang paling tinggi yakni produksi kerupuk kering. Disusul Kecamatan Selimbau, Bunut Hilir, Suhaid dan Semtau sebagai penghasil hasil olahan ikan yang masih konsisten dalam memproduksi hasil olahan ikan seperti kerupuk basah, kerupuk kering, ikan asin dan ikan salai. Dalam upaya peningkatan produk olahan di Kapuas Hulu perlu langkah dalam peningkatan produk baik kualitas maupun kuantitas. Untuk itu perlu dibantu dalam menyediakan sarana dan

prasarana dan perbaikan tempat pengolahan hasil perikanan seperti rehabilitasi rumah produksi

Tabel. T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
APBD																	
1. Belanja Langsung	10.895	11.811	15.977	14.737	8.296	10.839	10.793	15.575	14.371	7.612	99,49	91,38	97,48	97,52	91,76	12.343	11.838
2. Belanja Tidak Langsung	3.305	3.129	2.957	3.124	2.807	3.252	2.870	2.948	2.933	2.800	98,40	91,72	99,70	93,89	99,75	3.064	2.961
APBN																	
1. Dekonsentrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Tugas Pembantuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 10 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada pos anggaran belanja daerah khususnya pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 98,85%
2. Pada pos anggaran belanja daerah khususnya pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 97,30%. Capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun 2020 dimana rasio realisasi dengan pagu anggaran hanya sebesar 78,11%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada baik kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perikanan (Internal), serta melihat tantangan ke depan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki dan pihak luar (Ekternal) selama 2016 hingga 2021. Maka disusun SWOT strategi kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu tahun 2021 -2026.

Analisis SWOT adalah suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT adalah akronim dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threat* (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Adapun Analisa SWOT dapat dilihat dibawah ini :

Isu Strategis 2

Meningkatkan Produksi ikan Tangkap

FAKTOR EKTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	<ul style="list-style-type: none"> - Ekosistem sungai dan danau luas - Ketersediaan SDM Perikanan - Dikembalikannya Kewenangan Pengawasan (PP No.90 Tahun 2020) - Perpres No.60 Tahun 2021 tentang danau prioritas (Danau Sentarum) - Telah terbentuknya beberapa Pokmaswas 22 kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi dan keragaman jenis ikan perairan daratan yang menurun - Belum adanya tenaga pengawas Perikanan - Belum adanya pembatasan ukuran besar/berat/kondisi fisik / musim (bulan) yang boleh ditangkap - Kurangnya alat bantu untuk menjaga kualitas ikan paska tangkap untuk nelayan - Minimnya sarana Pengawasnya bagi Pokmaswas - Belum adanya MOU dengan BBTNBK-DS tentang pengawasan dan pengelolaan SDI di TNDS kompleks
FAKTOR INTERNAL		
OPORTUNITY (PELUANG)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ul style="list-style-type: none"> - Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian SDI - Adanya 26 Danau Lindung - Adanya kearifan lokal di beberapa desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produksi ikan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan sungai dan danau
THREAT (ANCAMAN)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran, ahli fungsi lahan, pertambahan penduduk, degradasi lingkungan - Maraknya Penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Mata jaring $\leq 1,5$ inci/2inci • Penempatan alat tangkap yang menghalangi lalu lintas ikan / jalur ruaya Ikan • Penggunaan alat racun biologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peranserta Pokmaswas dan aparaturnya penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan

Isu Strategis 3 :

Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya

<p>FAKTOR EKTERNAL</p>	<p>STRENGTH (KEKUATAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan manajemen dalam perencanaan - Sasaran dan tujuan terukur - Komunikasi internal berjalan efektif - Pasar telah tersegmentasi dengan efektif - Jumlah dan kualitas SDM memadai - Tim penjualan terbentuk dengan solid dan efektif - Harga jual produk yang bersaing - Promosi, iklan dan publisitas yang efektif - Pelayanan terhadap pembeli - Penerapan system distribusi sudah efektif - Pasokan Benih dan Pakan berjalan lancar - Kebijakan, instruksi kerja dan pengawasan produksi berjalan efektif - SOP dan Budaya kerja sudah baik - Hubungan kerja dengan stakeholder sudah berjalan baik 	<p>WEAKNESS (KELEMAHAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan manajemen dalam pengawasan masih lemah - Struktur organisasi belum sesuai kebutuhan - Tingkat perputaran Pegawai rendah - Sistem reward dan punishment bagi karyawan belum efektif - Pembagian hasil dari kerjasama operasional dengan perusahaan lain - Kualitas produk belum sesuai dengan keinginan pelanggan - Fasilitas, peralatan, mesin, dan alat lain belum memenuhi kebutuhan - Komponen dan pasokan spare part belum lancar - Kebijakan dan prosedur kerja dalam pengendalian kualitas berjalan efektif - Aspek permodalan kurang efektif - Pemanfaatan teknologi masih kurang
	<p>FAKTOR INTERNAL</p>	
<p>OPORTUNITY (PELUANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran pemerintah dan kebijakan pemerintah - Peningkatan Prospek pasar (kuantitas produk) - Struktur dan dinamika social - Letak geografis - Permintaan pasar terhadap produk baru - Perbaikan layanan umum - Budaya Masyarakat 	<p>STRATEGI S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi ikan budidaya dengan optimalnya produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi, keramba, kolam, kawasan terpadu, Lintas Sektor dan UPT BI Kelansin - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat 	<p>STRATEGI W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi benih UPT BI, UPR dan Pembudidaya Mandiri - Meningkatkan produksi pakan mandiri pelaku dan Pokdakan
<p>THREAT (ANCAMAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan Tawar Menawar Pemasok - Kekuatan Tawar Menawar Pembeli Persaingan di Antara Pengusaha yang Ada - Ancaman Produk atau Jasa Pengganti 	<p>STRATEGI S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan pelaku usaha budidaya ikan UPR, - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan unit pembenihan dalam memproduksi benih sesuai standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 	<p>STRATEGI W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan penyebaran penyakit ikan,pakan,obat- obatan ikan yang tidak seusai dengan SNI

Meningkatnya Produksi Ikan Olahan



PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan, khususnya pada sektor perikanan.

Guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

A. Isu strategis tingkat OPD :

1. Rendahnya penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas Perikanan
2. Produksi ikan tangkap relatif masih rendah.
3. Produksi ikan budidaya relatif masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi ikan.
4. Rendahnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis

B. Isu strategis tingkat Bidang :

1. Menurunnya potensi stok ikan di perairan umum daratan (PUD)
2. Rendahnya produksi benih baik volume, ragam jenis dan kualitas benih
3. Rendahnya pasokan ikan segar/hidup yang berkualitas baik di tingkat unit pengolah/ pasar
4. Menurunnya kualitas ekosistem danau

Tabel T.B 35 Identifikasi Permasalahan Pada Sektor Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rendahnya penyelenggaraan tatakelola Dinas Perikanan yang baik	Rendahnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya budaya integritas dan budaya kinerja aparatur 2. Kurangnya profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Rendahnya Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Belum tersedianya data yang akurat dan terbaru 5. Kurangnya pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 6. Rendahnya standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi 7. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai 8. Belum dilakukan pengukuran kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkala
2	Rendahnya pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar	Produksi ikan tangkap relatif masih rendah	Menurunnya potensi stok ikan di PUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penggunaan dan penempatan alat tangkap yang tidak beorientasi pada pelestarian ikan sebagaimana ketentuan Permen KP no 71/PermenKP/2016; undang-undang nomor 45 tahun 2009 : ukuran mata jaring ≥ 1 inci penempatan alat tangkap tidak memotong jalur ruaya ikan. 2. Meningkatnya penangkapan dengan penggunaan alat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan)			<p>dan bahan yang merusak ekosistem (sentrum listrik bahan kimia beracun)</p> <p>3. Kurangnya ruang bebas penangkapan ikan yang tidak lestari untuk waktu tertentu, guna memberi akses ikan berkembang biak, melalui kebijakan yang akomodatif (kebijakan moratorium pengkapan dengan intensif kompensasi program bantuan) atas realisasi dari suatu komitmen yang telah disepakati</p>
			Berkurang dan semakin langaknya ikan endemik tertentu yang bernilai ekonomi tinggi di PUD	<p>1. Menurunnya kualitas ekosistem danau</p> <p>2. Menurunnya Kualitas ekosistem sempadan</p> <p>3. Menurunnya Kualitas ekosistem teresterial daerah tangkapan air (DTA)</p> <p>4. Menurunnya Kurangnya penyediaan Kawasan suaka perikanan</p> <p>5. Kurangannya jumlah dan ragam jenis ikan endemik berpotensi langka yang dapat di koleksi/ di selamatkan dan dikembangkan pada kolam penangkaran</p> <p>6. Kurangnya jumlah dan ragam jenis ikan endemik yang mempengaruhi lainnya yang dapat di tebar di suaka perikanan</p> <p>7. Kurangnya produktifitas teknik peremajaan ikan secara alami (Sitem CBF) pada badan air potensial</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Produksi ikan budidaya relatif masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi ikan	Rendahnya produksi benih baik volume, ragam jenis dan kualitas benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi benih UPT-BI baik dalam jumlah ekor, ragam jenis benih dan jaminan kualitas benih (mendapatkan CPIB) 2. Rendahnya produksi benih UPR baik dalam jumlah ekor, ragam jenis benih dan jaminan kualitas benih (mendapatkan CPIB) 3. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi Pendidikan dan keahlian tertentu sesuai tuntutan tugas dan jabatan 4. Rendahnya kapasitas kelembagaan, kompetensi teknis, usaha dan akses kepada data/informasi perikanan UPR 5. Jumlah UPT Dinas pembenihan yang hanya satu dan belum memiliki cabang di beberapa tempat yang potensial untuk budidaya sehingga belum mampu di akses oleh semua pengusaha pembenihan/ Pokdakan dari semua wilayah daerah Desa/ Kecamatan yang jauh 6. Jumlah layanan jasa UPT BI sesuai Tusi hanya menyangkut penanganan pembenihan sehingga tidak dapat maksimal untuk membantu konsultasi yang terkait budidaya pada umumnya 7. Rendahnya kapasitas kelembagaan, kompetensi teknis, usaha dan akses kepada data/informasi perikanan 8. Kurangnya sarana produksi budidaya minapadi 9. Kurangnya sarana produksi budidaya kolam tanah 10. Kurangnya sarana produksi budidaya Bioflok 11. Kurangnya sarana produksi budidaya kolam/ wadah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penyebab Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				terpal 12. Kurangnya sarana produksi budidaya keramba jaring apung 13. Kurangnya sarana produksi budidaya keramba HDPE
		Rendahnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis	Rendahnya pasokan ikan segar/hidup yang berkualitas baik di tingkat unit pengolah/ pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya logistik ikan berbasis sistem rantai dingin 2. Belum terbangunnya dan terkelolanya sistem data informasi pasokan ikan 3. Belum operasionalnya pengelolaan pusat data dan informasi perikanan 4. Kurangnya kapasitas bongkar muat (Pelabuhan/ pendaratan ikan) yang representatif (memiliki akses ke sistem logistik dan pemasaran ikan) 5. Kurangnya pematangan teknis dalam bentuk pelatihan yang dapat diberikan di fasilitasi kepada calon pelaku usaha pengolahan hasil olahan ikan (Inkubasi) 6. Kurangnya pematangan, usaha dan pemasaran produk pelaku usaha produk olahan hasil ikan (pasca inkubasi)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang ingin diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Kapuas Hulu dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijabarkan sebagaimana berikut : Visi Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 yaitu :

“ TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL ”

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang dikalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) kedepan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 sektor Perikanan memangku pada Misi 2 (dua) dan 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1. Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

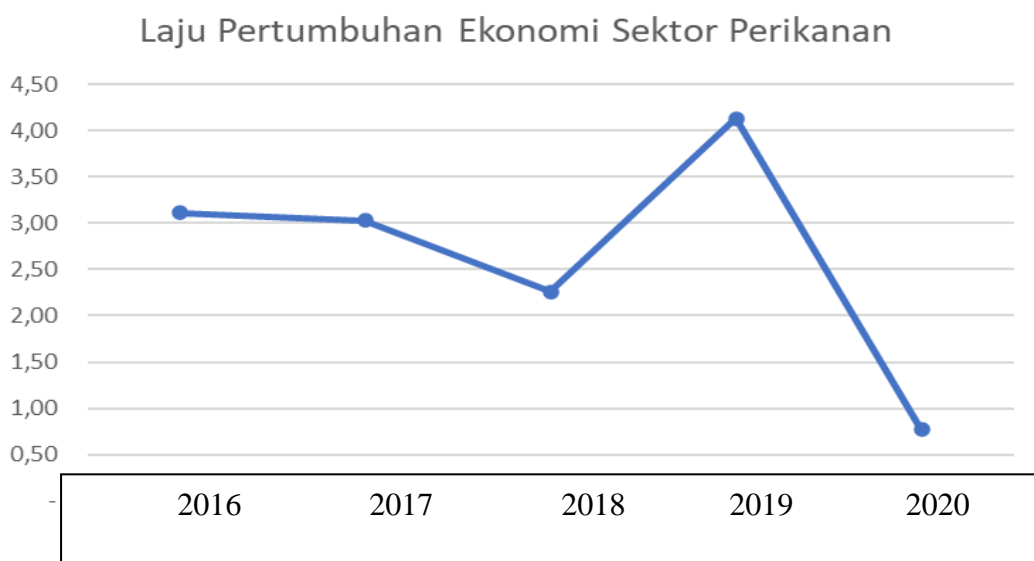
Misi kedua bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah, meningkatkan jumlah desa mandiri dengan sasaran meningkatnya jumlah desa dengan IDM kategori mandiri, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang mandiri , produktif dan berdaya saing, tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.

Sehingga untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi pada tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor perikanan.

Sebagai gambaran bahwa laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tahun 2020 sebesar 0,77 % atau menurun dari tahun 2019 sebesar 3,36 %. Secara lengkap laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dari tahun 2016 hingga 2020

No	Produksi	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan					
1	Perikanan	3,11	3,03	2,26	4,13	0,77

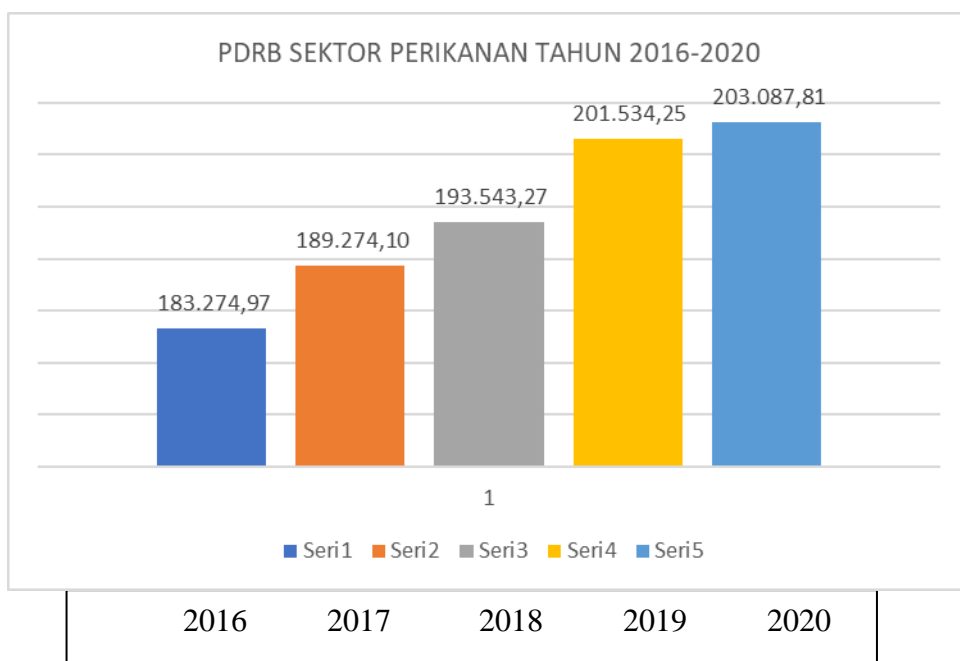


Penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia. Pengaruh pandemi terhadap sektor perikanan salah satunya tingkat daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan menurun. Meskipun menurun produksi perikanan masih terus meningkat.

Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan. PDRB yang digunakan sebagai dasar adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perikanan (dalam Juta) dari tahun 2016 hingga 2020 terus meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2020 PDRB sektor perikanan mencapai Rp. 203.087.810.000. Adapun gambaran PDRB dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.2 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sektor Perikanan

No	Produksi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sektor Perikanan	183.274,97	189.274,10	193.543,27	201.534,25	203.087,81



Grafik 2. Perkembangan PDRB Sektor Perikanan dari tahun 2016 - 2020

Berdasarkan terlihat ada 3 komponen yang saling berkaitan dalam hal meninggikan pertumbuhan ekonomi. Ketiga komponen itu adalah peningkatan produksi, kemajuan teknologi guna meningkatkan produktivitas, serta penyesuaian ideologi terbuka dan mampu menerima adanya teknologi yang baru.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan PDRB yang menjang pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang harus ditingkatkan adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan hasil pengolahan hasil ikan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna.

Tentunya untuk meningkatkan produksi perikanan perlu adanya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan teknologi saat ini. Sehingga sesuai apa yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 pada Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada point (h) yakni mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

2. Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Misi ke empat bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, optimalnya pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya predikat

Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, optimalnya kualitas keterbukaan informasi publik, meningkatnya maturitas SPIP. Tujuan kedua meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, meningkatnya layanan akses rumah tangga dengan akses air minum layak, meningkatnya layanan akses sanitasi layak.

Misi keempat akan dijalankan pada bagian Sekretariat Dinas Perikanan

3.3.1. Telaahan Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah **"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT "**

Dengan Misi (1). Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan PPK secara terpadu dan berkelanjutan., (2). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan, (3). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan. (4). Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan., (5). Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

Sasaran Produksi Perikanan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah 168.843,45 ton. Sasaran harus dicapai tersebut merupakan target yang harus dicapai oleh SKPD Kabupaten /kota dengan SKPD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Potensi pendukung utama dalam pengembangan perikanan yaitu budidaya perikanan tangkap adalah keberadaan sungai-sungai terutama sungai Kapuas, berdasarkan Renstra SKPD Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang mencapai 1.086 Km yang mana sepanjang 942 Km-nya dapat dilayari, sungai ini melalui beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan Kota Pontianak. Selain tiga Kabupaten yang dilalui Sungai Kapuas, Kabupaten lainnya juga secara umum yang memiliki sungai relatif panjang dan lebar. Kabupaten Sintang dengan Sungai Melawinya dimana panjangnya sekitar 471 Km, Kabupaten Sambas dengan sungai Sambas-nya 233 Km, Kabupaten Ketapang dengan Sungai Pawan dengan panjang 197 Km, Sungai Kendawangan (128 km), Kabupaten Sanggau dengan Sungai Sekayam (221 Km) dan Kabupaten Pontianak dengan sungai Landak dengan panjang 178 Km serta masih banyak

sungai lainnya yang melalui beberapa Kabupaten di Provinsi ini. Untuk danau jumlahnya cukup banyak, yang tersebar di beberapa Kabupaten dan danau yang memiliki luas cukup berarti terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Danau Sentarum (sekitar 117.500 Ha) dan Danau Luar sekitar 5.400 Ha. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Sedangkan permasalahan yang perlu ditinjau dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai adalah *Illegal fishing*, permodalan, Kualitas SDM, harga pakan, sarana dan prasarana produksi, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran. Permasalahan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan koordinasi lintas wilayah dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat antara lain peningkatan produksi spesifik daerah dengan penerapan teknologi dan benih unggulan, pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, pemanfaatan lahan masyarakat dan pengembangan kawasan untuk mendukung usaha nelayan dan pembudidaya. Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program (1). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap, (3). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya, (4). Program Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan, (5).Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presdien untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP

ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"**.

Terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: (1). **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. (2). **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. (3). **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1). **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi a) Memberantas *IUU Fishing*, b) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi, c) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan (2). **Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan**, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut a) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir, b). Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), c). Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap d). Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD), e) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan, f) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan, g) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses

Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan, h) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan yang (3). **Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi yaitu: **a)** Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, **b)** Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, **c)** Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan, **d)** Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, **e).** Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan. Arah kebijakan, strategi tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni Program Pengelolaan Ruang Laut, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap , Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Kajian Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 - 2034 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada sektor

pertanian, perikanan, kehutanan, kawasan peruntukan pertambangan serta pariwisata.

Kawasan perikanan yang terdapat pada Perda Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014, diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, serta kawasan pengolahan ikan. Selain itu juga terdapat Kawasan lindung yang termasuk di dalamnya kawasan suaka alam.

Kawasan pengolahan ikan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang mengolah hasil perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya perikanan.

3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup strategis adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. KHLS ini tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemeritah daerah wajib melaksanakan KHLS dalam penyusunan atau evaluasi (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Dengan menggunakan KHLS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh kedepan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Selain itu KHLS juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Produksi ikan tangkap relatif masih rendah
2. Produksi ikan budidaya relatif masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi ikan
3. Rendahnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis



TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026, Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD yang mendukung Kapuas Hulu di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perikanan.

Visi pembangunan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 adalah :

"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL".

Untuk mengaktualisasikan Visi yang dimaksud, terdapat dua (2) Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 – 2026 yang berkaitan dengan Dinas Perikanan yakni Misi kedua dan keempat yakni :

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Misi ke empat bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, optimalnya pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya predikat pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, optimalnya kualitas keterbukaan informasi publik, meningkatnya maturitas SPIP. Tujuan kedua meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, meningkatnya layanan akses

rumah tangga dengan akses air minum layak, meningkatnya layanan akses sanitasi layak.

Untuk menjawab sasaran tersebut maka Dinas Perikanan menentukan tujuan Dinas Perikanan kedalam Renstra yakni **Mewujudkan Dinas Perikanan yang Profesional, Akuntabel dan pelayanan prima kepada masyarakat**. Adapun sasaran yang akan dicapai tersebut adalah dengan meningkatnya penyelenggaraan tata kelola Dinas Perikanan yang baik dengan indikator predikat SAKIP pada Dinas Perikanan.

Misi ke 2 ; Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

Misi kedua bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah, meningkatkan jumlah desa mandiri dengan sasaran meningkatnya jumlah desa dengan IDM kategori mandiri, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang mandiri , produktif dan berdaya saing, tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.

Untuk mencapai sasaran makro (sasaran tingkatan Daerah) yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan tersebut, maka tujuan strategis pada tingkat OPD (Rencana Strategis Dinas Perikanan) haruslah diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha sektor perikanan melalui upaya peningkatan produktifitas unit-unit ekonomi sektor perikanan. Dan upaya peningkatan produktifitas unit- unit ekonomi sektor perikanan ini berarti pula adalah perbaikan dan atau peningkatan kinerja sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasarannya termasuk isu kerusakan lingkungan yang melingkupinya.

Guna merealisasikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan serta sasaran tersebut perlu ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Pertama

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan;

Sasaran :

Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan;

Tujuan Kedua

Meningkatkan pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan)

Sasaran :

1. Meningkatnya Produksi ikan tangkap;
2. Meningkatnya Produksi ikan budidaya; dan
3. Meningkatnya produksi ikan olahan hasil ikan dalam jumlah dan ragam jenis.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 secara lengkap termuat dalam Tabel T-C 25 di bawah :

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A
		1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas	1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan)		1. Angka Pasokan Ikan (%)	5	6	7	8	9
		1. Meningkatnya Produksi ikan tangkap	1. Produksi ikan tangkap (ton per tahun)	22.352,25	23.525,25	23.742,25	23.885,25	23.975,25
		2. Meningkatnya Produksi ikan budidaya	1. Jumlah produksi budidaya (Ton pertahun)	25.482	25.608	25.734	25.861	25.990
		3. Meningkatnya produksi ikan olahan dalam jumlah dan ragam jenis	1. Jumlah hasil produksi ikan olahan (Ton per tahun)	11.700	12.000	12.300	12.500	13.000
			2. Ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	5	5	5	5	5



STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Guna mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan Kinerja. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup penentuan kebijakan program, dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Misi dan Visi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sektor perikanan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi yang ada pada Dinas Perikanan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dimuat dalam Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dibawah ini :

Tabel. T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL		
MISI RPJMD 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset	9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11. Peningkatan disiplin aparatur 12. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 13. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
MISI RPJMD 2	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi		
2. Meningkatkan pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi dan produk olahan ikan)	1. Meningkatkan Produksi ikan tangkap	1. Meningkatkan potensi ikan tangkap	1. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		2. Meningkatkan ekosistem danau/sungai dalam kondisi baik	2. Pelestarian dan pengendalian pengelolaan periaran umum daratan (PUD)
	2. Meningkatkan Produksi ikan budidaya	Meningkatkan sistem perikanan budidaya	1. Pengelolaan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2. Peningkatan produksi benih pada UPT Benih Ikan Kelansin, UPR dan pembudidaya mandiri
	3. Meningkatkan pasokan ikan segar/hidup yang berkualitas baik di tingkat unit pengolah maupun di tingkat pasar	Meningkatkan ketersediaan bahan olahan ikan dalam jumlah dan ragam jenis	1. Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan 2. Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)

Dari tahapan-tahapan penyusunan strategi-strategi menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis tersebut dibuat dengan melihat capaian 5 (lima) tahun sebelumnya tahun 2016 – 2020 pada Bab II. Sehingga dapat ditarik kesimpulan strategi oleh Dinas Perikanan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor perikanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
4. Meningkatkan ragam jenis produk yang dapat di produksi unit pengolah hasil perikanan dan omzet penjualan produk
5. Meningkatkan pasokan ikan berkualitas sesuai kebutuhan

1.2. Kebijakan

Dalam melaksanakan strategi tersebut maka perlu dilaksanakan kebijakan atau arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan memberdayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan, pengolah hasil perikanan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan kebijakan diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi; Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan dan desa; Membangun sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan professional

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif;

3. Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur, Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

5. Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja

Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah;
Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan terbaru

6. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatkan potensi/stok ikan tangkap di PUD;
Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk pemulihan sumber daya ikan; Meningkatkan partisipasi kelembagaan nelayan dalam pembangunan perikanan; Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan meningkatnya partisipasi nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan; perikanan Meningkatkan produksi ikan tangkap pada perairan berbasis CBF; Menghentikan sementara secara bertahap mengenai cara penangkapan dan budidaya yang tidak lestari, sehingga populasi ikan meningkat

7. Pelestarian dan pengendalian pengelolaan perairan umum daratan (PUD)

Meningkatkan ragam/jenis dan jumlah populasi masing - masing jenis ikan endemik pada pusat penangkaran; Memfasilitasi pembentukan dan rapat - rapat instalasi lintas sektor (Pokja) untuk merumuskan suatu kebijakan terkait upaya penyelamatan danau yang dilakukan secara bersama – sama; Melaksanakan penyusunan draf peraturan - peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan di perairan umum daratan; Meningkatkan peranserta POKMASWAS dan aparaturnya penegak hukum tindak pidana perikanan dan lingkungan

8. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatkan kapasitas sarana faktor- faktor produksi perikanan budidaya masyarakat; Meningkatkan keterampilan pembudidaya; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya terpadu; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya berbasis CBF; Meningkatkan produksi ikan melalui pengelolaan budidaya miinapadi; Meningkatnya produksi ikan melalui pengelolaan kawasan budidaya kemitraan, lintas sektor (Kampung KB, P2WKSS,/BBGR, Pemerintah Desa; Meningkatkan pengawasan Perikanan Budidaya yang meliputi peredaran pakan dan obat-obatan serta kesehatan lingkungan

9. Penguatan Daya Saing Produksi Perikanan

Gemar makan ikan; mengidentifikasi, terinvestigasi dan tersusunnya proposal perbaikan atas kasus penurunan produktivitas budidaya tertentu; Mempersiapkan ketersediaan calon instruktur sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan, ketersediaan modul ajar dan prasarana/ sarana/ peralatan penunjang pelatihan dan pelaksanaan yang berpengalaman dalam mengelola pelatihan; Meningkatkan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan dalam membuat produk; Meningkatkan kemampuan pengolah hasil perikanan dalam mengelola usaha; Meningkatkan kemandirian kelompok pengolah dalam mengolah usaha; Meningkatkan ragam jenis dan nilai produk yang dapat di pasarkan oleh kelompok pengola; Meningkatkan mutu produk perikanan.



RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Berdasarkan kerangka pendanaan telah ditetapkan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun program prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pelestarian dan Pengendalian Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel T.C 27 berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Tujuan 1																						
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan				1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	-	BB	-	BB	-	A	-	A	-	B	-	Kepala Dinas	Dinas Perikanan			
	Sasaran Strategis 1. : Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabel Kinerja Dinas			1. Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB		BB		BB		A		A		B	-	Kepala Dinas	Dinas Perikanan			
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat penilaian realisasi keuangan	100%	100	%	7.556.371.988	100	%	7.566.185.188	100	%	7.607.632.088	100	%	7.653.233.788	100	%	38.036.656.840	Sekretaris Dinas	Dinas Perikanan
				2. Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
				3. Persentase pemenuhan data kepegawaian	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
				4. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82%	82	%		85	%		87	%		88	%		89	%			
				5. Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
				6. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
				7. Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
			1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	22	Dokumen	261.900.000	22	Dokumen	236.600.000	22	Dokumen	236.600.000	22	Dokumen	236.600.000	131	Dokumen	1.208.300.000	Kepala Subbag Program	Dinas Perikanan
				2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen			
			1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU, KAK, KI, Peta Proses Bisnis, SOP, Roadmap Reformasi Birokrasi, Register Risiko	1 Dokumen	8	Dokumen	68.500.000	8	Dokumen	52.800.000	8	Dokumen	52.800.000	8	Dokumen	52.800.000	15	Dokumen		Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Dinas Perikanan
			1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1	Dokumen	6.800.000	1	Dokumen	6.800.000	1	Dokumen	6.800.000	1	Dokumen	6.800.000	5	Dokumen			Dinas Perikanan
			1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA dan RUP Dinas Perikanan	1 Dokumen	2	Dokumen	7.200.000	2	Dokumen	7.200.000	2	Dokumen	7.200.000	2	Dokumen	7.200.000	5	Dokumen			Dinas Perikanan
			1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA-Perubahan dan Perubahan RUP Dinas Perikanan	1 Dokumen	2	Dokumen	7.800.000	2	Dokumen	7.800.000	2	Dokumen	7.800.000	2	Dokumen	7.800.000	5	Dokumen			Dinas Perikanan
			1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ	1 Dokumen	3	Dokumen	8.400.000	3	Dokumen	8.400.000	3	Dokumen	8.400.000	3	Dokumen	8.400.000	40	%			Dinas Perikanan
			1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen PK, MONEV, Pengukuran Kinerja, Evaluasi RENJA, Evaluasi Kinerja, RFI-KO	1 Dokumen	5	Dokumen	163.200.000	5	Dokumen	153.600.000	5	Dokumen	153.600.000	5	Dokumen	153.600.000	60	%			Dinas Perikanan

RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	65	Dokumen	4.126.696.788	65	Dokumen	4.129.221.988	65	Dokumen	4.129.221.988	65	Dokumen	4.129.221.988	65	Dokumen	4.129.221.988	65	Dokumen	20.643.584.740	Kepala Subbag Keuangan	Dinas Perikanan
			2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12	Dokumen	3.602.758.788	12	Dokumen	3.602.758.788	12	Dokumen	3.602.758.788	12	Dokumen	3.602.758.788	12	Dokumen	3.602.758.788	12	Dokumen			Dinas Perikanan
			2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa + Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	50%	35	Dokumen	491.489.000	35	Dokumen	491.489.000	35	Dokumen	491.489.000	35	Dokumen	491.489.000	35	Dokumen	491.489.000	35	Dokumen			Dinas Perikanan
			2.3 Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1	Dokumen	7.776.000	1	Dokumen	8.543.600	1	Dokumen	8.543.600	1	Dokumen	8.543.600	1	Dokumen	8.543.600	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			2.4 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1. Jumlah Dokumen Tanggapan terhadap HASIL Pemeriksaan APPI BPK/P BPKI KPK	100%	1	Dokumen	7.007.000	1	Dokumen	7.007.000	1	Dokumen	7.007.000	1	Dokumen	7.007.000	1	Dokumen	7.007.000	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1. Jumlah Dokumen Laporan evaluasi penelausahaan keuangan Perbulan, Per triwulan	12 Dokumen	16	Dokumen	17.666.000	16	Dokumen	19.423.600	16	Dokumen	19.423.600	16	Dokumen	19.423.600	16	Dokumen	19.423.600	16	Dokumen			Dinas Perikanan
			3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10	Dokumen	223.511.000	10	Dokumen	248.371.000	10	Dokumen	264.698.000	10	Dokumen	282.667.500	10	Dokumen	282.667.500	10	Dokumen	1.301.915.000	Kepala Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
			3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah dokumen RKBMD	1 Dokumen	1	Dokumen	55.011.000	1	Dokumen	60.521.000	1	Dokumen	66.563.000	1	Dokumen	73.219.000	1	Dokumen	73.219.000	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Kodefikasi/Regiter BMD	1 Dokumen	1	Dokumen	22.000.000	1	Dokumen	24.200.000	1	Dokumen	26.620.000	1	Dokumen	29.282.000	1	Dokumen	29.282.000	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1. SK Tim Penghapusan BMD, Daftar Penghapusan BMD, Laporan Penghapusan BMD	2 Unit	3	Dokumen	55.000.000	3	Dokumen	60.500.000	3	Dokumen	66.550.000	3	Dokumen	73.205.000	3	Dokumen	73.205.000	3	Dokumen			Dinas Perikanan
			3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Daftar Penunjukan Penggunaan BMD, Laporan Movev per-semester	65%	2	Dokumen	75.000.000	2	Dokumen	85.000.000	2	Dokumen	85.000.000	2	Dokumen	85.000.000	2	Dokumen	85.000.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
			3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi BMD Semester I dan Semester 2	2 Dokumen	2	Dokumen	11.000.000	2	Dokumen	12.100.000	2	Dokumen	13.310.000	2	Dokumen	14.641.000	2	Dokumen	14.641.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
			3.6 Penabusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD (KIR/ KIB)	1 Dokumen	1	Dokumen	5.500.000	1	Dokumen	6.050.000	1	Dokumen	6.655.000	1	Dokumen	7.320.500	1	Dokumen	7.320.500	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			4 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	25.000.000	Kepala Subbag Keuangan	Dinas Perikanan
			4.1 Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen			Dinas Perikanan
			5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20	Dokumen	312.165.500	20	Dokumen	347.002.000	20	Dokumen	372.121.900	20	Dokumen	399.754.100	20	Dokumen	399.754.100	20	Dokumen	1.830.797.600	Kepala Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
			5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. 1) PERKA KODE ETIK PEGAWAI 2 Maklumat Penegakan Disiplin ASN/ Malu datang Terlambat, 3) SK Agen	90%	2	Dokumen	55.000.000	2	Dokumen	60.500.000	2	Dokumen	66.550.000	2	Dokumen	73.205.000	2	Dokumen	73.205.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
			5.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Dokumen SPK dan BAST Pakaian Dinas	0	2	Dokumen	150.590.000	2	Dokumen	165.649.000	2	Dokumen	182.213.900	2	Dokumen	200.435.000	2	Dokumen	200.435.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
			5.3 Pendanaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen ANJAB-ABK, Daftar Kebutuhan Pegawai, DUK, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar Kenaikan gaji berkala, SKUM	80 (8)	6	Dokumen	17.275.500	6	Dokumen	19.003.000	6	Dokumen	20.903.000	6	Dokumen	22.993.600	6	Dokumen	22.993.600	6	Dokumen			Dinas Perikanan
			5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Laporan Movev Sistem Informasi kepegawaian dari Aplikasi My SAPK BKN, LHKPN/LHKASN	0%	2	Dokumen	5.500.000	2	Dokumen	6.050.000	2	Dokumen	6.655.000	2	Dokumen	7.320.500	2	Dokumen	7.320.500	2	Dokumen			Dinas Perikanan
			5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKP, SKP Bulanan, SKP Tahunan, SK Pegawai Terbaik, Absensi Manual/ digital, Laporan Movev Disiplin ASN	30 Naskah	6	Dokumen	51.000.000	6	Dokumen	63.000.000	6	Dokumen	63.000.000	6	Dokumen	63.000.000	6	Dokumen	63.000.000	6	Dokumen			Dinas Perikanan
			5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan Diklat Aparatur DIKAN, Laporan Pelaksanaan Diklat Sertifikat Diklat Aparatur	0 UJ	2	Dokumen	32.800.000	2	Dokumen	32.800.000	2	Dokumen	32.800.000	2	Dokumen	32.800.000	2	Dokumen	32.800.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan

RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

		6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Dokumen administrasi Umum	70	17	Dokumen	362.262.000	17	Dokumen	389.002.000	17	Dokumen	389.002.000	17	Dokumen	389.002.000	17	Dokumen	389.002.000	17	Dokumen	1.918.270.000	Kepala Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
		6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan komponen listrik/penerangan, Laporan Penggunaan komponen Listrik	12 Rekening	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan alat dan perlengkapan kantor tahun berjalan, Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2	Dokumen	10.450.000	2	Dokumen	11.459.000	2	Dokumen	11.459.000	2	Dokumen	11.459.000	2	Dokumen	11.459.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Daftar Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga, Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah	12 Bulan	2	Dokumen	9.592.000	2	Dokumen	10.551.000	2	Dokumen	10.551.000	2	Dokumen	10.551.000	2	Dokumen	10.551.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Dokumen Daftar Kebutuhan barang cetakan / penggandaan, Laporan penyediaan barang cetakan	100%	2	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan, Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan	12 Bulan	2	Dokumen	27.720.000	2	Dokumen	30.492.000	2	Dokumen	30.492.000	2	Dokumen	30.492.000	2	Dokumen	30.492.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Dokumen Daftar Rapat SKPD, Daftar Perjalanan Dinas	10 kali	2	Dokumen	220.000.000	2	Dokumen	242.000.000	2	Dokumen	242.000.000	2	Dokumen	242.000.000	2	Dokumen	242.000.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Daftar Surat Keluar dan Masuk	0 Dokumen	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen	25.000.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		6.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan Peningkatan Jaringan Internet, Hosting Website, Pengelolaan Web dan Sosial Media.	0 Produk	3	Dokumen	47.500.000	3	Dokumen	47.500.000	3	Dokumen	47.500.000	3	Dokumen	47.500.000	3	Dokumen	47.500.000	3	Dokumen			Dinas Perikanan
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2	Dokumen	222.450.000	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	710.564.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
		7.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Dokumen Daftar Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Laporan Realisasi Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Jenis	2	Dokumen	222.450.000	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen	122.028.500	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75	Dokumen	1.902.766.700	75	Dokumen	1.924.677.700	75	Dokumen	1.924.677.700	75	Dokumen	1.924.677.700	75	Dokumen	1.924.677.700	75	Dokumen	9.601.477.500	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
		8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Dokumen Surat yang dikirim	70 Surat	70	Dokumen	3.850.000	70	Dokumen	4.235.000	70	Dokumen	4.235.000	70	Dokumen	4.235.000	70	Dokumen	4.235.000	70	Dokumen			Dinas Perikanan
		8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Dokumen Daftar penggunaan telepon dan internet, Daftar penggunaan Air ledeng, Daftar penggunaan daya	100%	1	Dokumen	150.260.000	1	Dokumen	165.286.000	1	Dokumen	165.286.000	1	Dokumen	165.286.000	1	Dokumen	165.286.000	1	Dokumen			Dinas Perikanan
		8.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Dokumen Daftar Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan OPD	100%	2	Dokumen	22.429.000	2	Dokumen	22.429.000	2	Dokumen	22.429.000	2	Dokumen	22.429.000	2	Dokumen	22.429.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Dokumen Daftar Pegawai Non ASN, Laporan Sasaran Kinerja Pegawai non ASN	100%	2	Dokumen	1.726.227.700	2	Dokumen	1.732.727.700	2	Dokumen	1.732.727.700	2	Dokumen	1.732.727.700	2	Dokumen	1.732.727.700	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	3	Dokumen	139.620.000	3	Dokumen	164.282.000	3	Dokumen	164.282.000	3	Dokumen	164.282.000	3	Dokumen	164.282.000	3	Dokumen	796.748.000	Subbag Umum dan Aparatur	Dinas Perikanan
		9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Dokumen Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, Laporan pemeliharaan kendaraan dinas, Daftar Pembayaran Pajak Kendaraan	100%	3	Dokumen	130.620.000	3	Dokumen	153.482.000	3	Dokumen	153.482.000	3	Dokumen	153.482.000	3	Dokumen	153.482.000	2	Dokumen			Dinas Perikanan
		9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah pajak/ surat tanda nomor kendaraan dinas (STNK) roda 5 yang terbayar	4 Surat	5	Surat	9.000.000	5	Surat	10.800.000	5	Surat	10.800.000	5	Surat	10.800.000	5	Surat	10.800.000	25	Surat			Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Juan 2	Meningkatkan pasokan ikan dan produk olahan di tingkat konsumen dan atau pasar dan unit pengolah (semua jenis komoditi) dan produk olahan ikan)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Daratan yang terawasi	40 %	20	%	550.000.000	20	%	450.000.000	20	%	450.000.000	20	%	450.000.000	100	%	2.350.000.000	Kepala Bidang P2WK	Kapas Hulu				
					1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam ...	22 Pokmaswas	2	Pokmaswas	550.000.000	2	Pokmaswas	450.000.000	2	Pokmaswas	450.000.000	2	Pokmaswas	450.000.000	10	Pokmaswas	2.350.000.000	Seksi Perlindungan Nelayan	Kec. Putussibau Utara, Embalah Hilir, Embalah Hulu, Bika, Bunut Hilir, Selimbau, Suhaid, Jongkong, Batang				
					1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Kasus	2	Kasus	250.000.000	2	Kasus	150.000.000	2	Kasus	150.000.000	2	Kasus	150.000.000	10	Kasus	850.000.000	Seksi Perlindungan Nelayan/ Analisis Kelayakan	Kec. Putussibau Utara, Embalah Hilir, Embalah Hulu, Bika, Bunut Hilir, Selimbau, Suhaid, Jongkong, Batang Luper dan Badau				
					1.2 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Usaha	2	Usaha	300.000.000	2	Usaha	300.000.000	2	Usaha	300.000.000	2	Usaha	300.000.000	10	Usaha	1.500.000.000	Seksi Perlindungan Nelayan/ Analisis Kelayakan	Kec. Putussibau Utara, Embalah Hilir, Embalah Hulu, Bika, Bunut Hilir, Selimbau, Suhaid, Jongkong, Batang Luper dan Badau				
					2. Jumlah wilayah ekosistem habitat (sungai, danau) yang terawasi	0 ekol/sungai/danau	1	ngai/danau		1	ngai/danau		1	ngai/danau		1	ngai/danau		5	ngai/danau							
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya produksi ikan budidaya					1. Jumlah Produksi Budidaya (Ton/Tahun)	25.356 Ton	25.482	Ton		25.608	Ton	25.734	Ton		25.861	Ton	25.990	Ton	25.990	Ton		Kepala Dinas	Kapas Hulu				
			4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah produksi benih (ekor)	600377 ekor	1.040.000	Ekor	10.597.395.599	1.120.000	Ekor	9.721.395.599	1.200.000	Ekor	9.840.395.599	1.280.000	Ekor	9.789.395.599	1.360.000	Ekor	9.965.395.599	1.360.000	Ekor	49.913.977.995	Kabid Perikanan Budidaya	Kapas Hulu	
					2. Jumlah ragam jenis benih	12 jenis	12	Jenis		14 jenis	Jenis		14	Jenis		15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis				
					3. Jumlah produksi pakan alami	125 Kg	136	Kg		149	Kg		162	Kg		173	Kg		185	Kg		185	Kg				
					4. Jumlah ikan konsumsi (ton/tahun)	21.430,50 Ton	22.500	Ton		23.350	Ton		23.553	Ton		23.675	Ton		24.355	Ton		24.355	Ton				
					5. Jumlah ikan hias	55.000 ekor	57.000	Ekor		58.000	Ekor		58.000	Ekor		58.500	Ekor		59.500	Ekor		59.500	Ekor		-		
			1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah pelaku usaha budidaya yang mengikuti pelatihan	2 Pelatihan	4	Pelatihan	2.489.626.000	4	Pelatihan	1.613.626.000	3	Pelatihan	1.732.626.000	3	Pelatihan	1.681.626.000	4	Pelatihan	1.857.626.000	4	Pelatihan	9.375.130.000	Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Pembudiya Ikan Kecil	Kec. Selimbau, Jongkong, Semitau, Bunut Hulu, Hulu Gurung dan Batang Luper	
					2. Jumlah kemitraan yang dapat dikerjasamakan	0 Mitra	1	Mitra		1	Mitra		1	Mitra		1	Mitra		1	Mitra		5	Mitra				
					1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20 Orang	25	Orang	100.000.000	25	Orang	100.000.000	30	Orang	110.000.000	30	Orang	110.000.000	40	Orang	125.000.000	5	Orang	545.000.000	Kec. Selimbau, Jongkong, Semitau, Bunut Hulu, Hulu Gurung dan Batang Luper	
					2. Ragam jenis pelatihan yang dilaksanakan	2 Pelatihan	2	Pelatihan		2	Pelatihan		2	Pelatihan		2	Pelatihan		2	Pelatihan		5	Pelatihan				
					1.2 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Presentase realisasi penyaluran bantuan yang dapat disalurkan dibandingkan target (%)	100%	100	%	637.626.000	100	%	637.626.000	100	%	637.626.000	100	%	562.626.000	100	%	687.626.000	100	%	3.163.130.000	Analisis Budidaya Perikanan	Kec. Putussibau Utara, Pengladan, Mentebah dan Hulu Gurung
			2	Jumlah sasaran kelompok pendampingan	2. Jumlah produksi ikan di luar kawasan budidaya terpadu, Minapadi dan Kemitraan	3 Ton	3	Ton		3	Ton		3	Ton		4	Ton		5	Ton		18	Ton				
					1.3 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	1. Jenis Pendampingan dalam bentuk uji coba produksi bersama kelompok	0 Jenis	3	Jenis	1.752.000.000	6	Jenis	876.000.000	9	Jenis	985.000.000	12	Jenis	1.009.000.000	15	Jenis	1.045.000.000	45	Jenis	5.667.000.000	Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Pemberdayaan Ikan	Kec. Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Hulu Gurung, Pengladan, Boyan Tanjung dan Bunut Hulu
					2. Jumlah sasaran kelompok pendampingan	0 Kelompok	3	Kelompok		6	Kelompok		12	Kelompok		12	Kelompok		15	Kelompok		48	Kelompok				
					3. Jenis pelatihan untuk kelompok sasaran	0 Kelompok	3	Kelompok		3	Kelompok		3	Kelompok		3	Kelompok		3	Kelompok		15	Kelompok				
					4. Jumlah kelompok pelatihan pembenihan	0 Kelompok	3	Kelompok		6	Kelompok		9	Kelompok		12	Kelompok		15	Kelompok		45	Kelompok				
			3	Jumlah orang pelatihan pembesaran	5. Jumlah orang pelatihan pembesaran	0 Orang	48	Orang		48	Orang		48	Orang		48	Orang		48	Orang		240	Orang				
					6. Jumlah orang pelatihan pakan	0 Orang	20	Orang		25	Orang		30	Orang		30	Orang		30	Orang		135	Orang				

RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

			2 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) yang diterbitkan	18 Surat	18 Surat	20.000.000	20 Surat	20.000.000	20 Surat	20.000.000	21 Surat	20.000.000	22 Surat	20.000.000	101 Surat		Seksi Pembudayaan dan Perindugan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan	Dinas Perikanan
			2.1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah SOP Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen		Pengadministrasi Umum	Dinas Perikanan
			2.2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah unit usaha yang difasilitasi Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK)	0 Unit	18 Unit	10.000.000	20 Unit	10.000.000	20 Unit	10.000.000	21 Unit	10.000.000	22 Unit	10.000.000	101 Unit		Pengadministrasi Umum	Dinas Perikanan
			3 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di kolam	6.098 Ton	6.102	8.087.769.599	6.120 Ton	8.087.769.599	6.200 Ton	8.087.769.599	6.221 Ton	8.087.769.599	6.250 Ton	8.087.769.599	6.250 Ton	40.438.847.995	Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersebar di 23 Kecamatan
				2. Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di keramba	19.254 Ton	19.373 Ton		19.480 Ton		19.524 Ton		19.630 Ton		19.730 Ton		19.730 Ton			
				3. Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di	0,8 Ton	1,0 Ton		1,3 Ton		1,4 Ton		1,4 Ton		1,4 Ton		1,4 Ton			
				4. Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya di bioflok	0	3 Ton		3,2 Ton		3,2 Ton		3,2 Ton		3,2 Ton		3,2 Ton			
				5. Jumlah produksi ikan budidaya di kawasan terpadu	0	- Ton		- Ton		- Ton		0,5 Ton		1 Ton		1 Ton			
				6. Jumlah produksi ikan budidaya di kawasan kemirisan	3 Ton	3 Ton		3 Ton		5 Ton		5 Ton		5 Ton		5 Ton			
				7. Jumlah produksi benih ikan di UPT BI	400.000 ekor	420.000 Ekor		440.000 Ekor		460.000 Ekor		480.000 Ton		500.000 Ton		500.000 Ton			
				8. Jumlah produksi benih ikan di UPR	65.000 ekor	70.000 Ekor		80.000 Ekor		90.000 Ekor		100.000 Ekor		110.000 Ekor		110.000 Ekor			
				9. Jumlah produksi benih ikan di pembudidayaan mandiri	500.000 ekor	550.000 Ekor		600.000 Ekor		650.000 Ekor		700.000 Ekor		750.000 Ekor		750.000 Ekor			
			3.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen data perikanan budidaya yang terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen		Pengolah data	Tersebar di 23 Kecamatan
			3.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah kolam pembudidayaan yang dibangun	20 Unit	20 Unit	1.500.000.000	20 Unit	1.500.000.000	20 Unit	1.500.000.000	20 Unit	1.500.000.000	20 Unit	1.500.000.000	100 Unit		Penyusun rencana bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	Tersebar di 23 Kecamatan
				2. Jumlah keramba apung pembudidayaan yang dibangun	30 Unit	30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		150 Unit			
				3. Luas Budidaya Minapadi yang dibangun	2 Ha	2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha			
				4. Persentase sarana UPT BI yang dibangun	60%	65 %		70 %		75 %		80 %		85 %		40 Unit			
				5. Jumlah kolam sistem bioflok yang dibangun	20 Bak	10 Bak		10 Bak		10 Bak		10 Bak		10 Bak		70 Bak			
				6. Jumlah unit sarana kawasan terpadu yang dibangun	0 Unit	- Unit		- Unit		- Unit		1 Unit		1 Unit		2 Unit			
			3.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah benih yang disediakan UPR Pembudidayaan dalam ekori/bahun	200.000 ekor	200.000 Ekor	6.437.769.599	200.000 Ekor	6.437.769.599	200.000 Ekor	6.437.769.599	200.000 Ekor	6.437.769.599	200.000 Ekor	6.437.769.599	10.000.000 Ekor		Analisis Budidaya Perikanan	Tersebar di 23 Kecamatan
				2. Retribusi hasil penjualan benih (PAD) UPT BI yang disetor	Rp. 190.000.000	200 Juta		215 Juta		230 Juta		240 Juta		250 Juta		200 Juta			
			3.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah penyakit ikan pada usaha budidaya yang dapat diobati (kasus)	3 Kasus	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus		Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan	Tersebar di 23 Kecamatan
				2. Ragam jenis penyakit ikan pada usaha budidaya yang dapat diobati (kasus)	3 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis			
			3.5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Darat	1. Jumlah komoditi pada UPR yang mendapatkan CPB	2 Komoditi	3 Komoditi	50.000.000	4 Komoditi	50.000.000	5 Komoditi	50.000.000	5 Komoditi	50.000.000	7 Komoditi	50.000.000	7 Komoditi		Pengelola pengawasan pembudidayaan ikan	Tersebar di 23 Kecamatan
				2. Jumlah komoditi pada pelaku usaha pembenihan yang mendapatkan CPB															
				a. Jumlah komoditi pada UPT BI yang mendapatkan CPB	6 Komoditi	7 Komoditi		8 Komoditi		9 Komoditi		10 Komoditi		11 Komoditi		11 Komoditi			
				b. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan CBB	1 Pelaku	2 Pelaku		3 Pelaku		4 Pelaku		5 Pelaku		6 Pelaku		6 Pelaku			

RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Isu Strategis 4 : Meningkatkan produksi ikan olahan dalam jumlah dan ragam jenis				1. Jumlah hasil produksi ikan olahan (Ton per tahun)	11.370 ton		12.000 ton		12.300 ton		12.500 ton		13.000 ton		13.000 ton		Kepala Dinas Perikanan	Kapuas Hulu		
					2. Ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolahan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis								
			5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Angka pasokan ikan segar	5%	5,3 %	755.000.000	5,6 %	765.000.000	6 %	1.005.000.000	6,3 %	910.000.000	6,5 %	975.000.000	6,5 %	4.410.000.000	Bidang Kelembagaan dan TPI	Kapuas Hulu
					2. Angka konsumsi ikan	40 kg/Kapita/th	40,5 g/Kapita/th		41 g/Kapita/th		41,5 g/Kapita/th		42,0 g/Kapita/th		42,5 g/Kapita/th		42,5 Kg/Kapita/th			
			1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	1. Persentase pengolahan yang terdada			280.000.000	14 %	280.000.000	16 %	280.000.000	18 %	280.000.000	20 %	280.000.000	80 %	1.400.000.000	Seksi Kelembagaan dan Seksi Pengelolaan TPI	Kapuas Hulu
						10%	12 %													
				1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen data angka konsumsi ikan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	5 Dokumen		Kapuas Hulu	
					2. Jumlah dokumen data pengolahan perikanan yang	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
					3. Jumlah dokumen data angka pasokan ikan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
					4. Jumlah dokumen data statistik perikanan	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen			
					5. Jumlah dokumen segmen data capaian kinerja	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		Penyusun rencana kelembagaan pasar hasil perikanan	
					6. Jumlah dokumen usulan paket pekerjaan DAK	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		Penyusun rencana kelembagaan pasar hasil perikanan	
					7. Jumlah dokumen usulan paket pekerjaan DAU	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen			
					8. Jumlah dokumen perencanaan dalam bentuk Juknis	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen			
					9. Jumlah dokumen perencanaan dalam bentuk KAK	0	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		Pengelola, pengawasan, pengangkutan dan pemasaran ikan	
					10. Jumlah Juknis tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen			
			2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1. Jumlah Poklaksar yang menerima bantuan	4 Kelompok	5 Kelompok	285.000.000	6 Kelompok	310.000.000	6 Kelompok	320.000.000	6 Kelompok	320.000.000	7 Kelompok	330.000.000	30 Kelompok	1.565.000.000	Seksi Kelembagaan	Kec. Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, Selimbau, Suhaid Sembau, Lanjak dan Badau
					2. Jumlah pelaku usaha yang sadar mutu	0	20 Pelaku		20 pelaku		20 pelaku		20 pelaku		20 pelaku		20 pelaku	-		
					3. Jumlah ragam/jenis produk yang bermutu	0	3 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		5 Jenis	-		
				2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1. Jumlah orang lulus pelatihan hasil pengolahan perikanan	20 Orang	20 Orang	285.000.000	20 Orang	310.000.000	20 Orang	320.000.000	20 Orang	320.000.000	20 Orang	330.000.000	100 Orang	250.000.000	Seksi Kelembagaan	Kec Bunut Hilir dan Kec Selimbau
					2. Jumlah pameran yang diikuti	0	2 Kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		14 kegiatan	-	Kapuas Hulu dan luar Kapuas Hulu	
					3. Jumlah lokasi promosi Gelar Makan Ikan	0	1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		5 lokasi	-	Kapuas Hulu	
			3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ikan konsumsi yang tersedia di tingkat pengolahan dan konsumen	50 %	55 %	190.000.000	60 %	175.000.000	65 %	405.000.000	70 %	310.000.000	75 %	365.000.000	75 %	1.445.000.000	Seksi Pengelolaan TPI	Kec. Selimbau, Suhaid, Jongkong, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Embaloh
				3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah ikan segar yang dapat disediakan di tingkat pengolahan dan konsumen (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	66.789,75 Ton	150.000.000	69.624,00 Ton	135.000.000	72.823 Ton	365.000.000	75.895 Ton	270.000.000	88.500 Ton	325.000.000	88.500 Ton	1.245.000.000	Kec. Selimbau, Suhaid, Jongkong, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir	
					2. Persentase sarana dan prasarana sistem logistik ikan yang di bangun	0%	3 %		4 %		5 %		10 %		15 %		15 %			
				3.2 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Halal MUJ, SPRT dan BPOM	0	2 Pelaku	40.000.000	2 Pelaku	40.000.000	2 Pelaku	40.000.000	2 Pelaku	40.000.000	2 Pelaku	40.000.000	10 Pelaku	200.000.000	Seksi Kelembagaan	Kec. Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, Selimbau, Suhaid Sembau, Lanjak dan Badau
					Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk mendapatkan badan hukum	0	2 Pelaku		2 Pelaku		2 Pelaku		2 Pelaku		2 Pelaku		10 Pelaku			



KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

Guna mengetahui dan mengevaluasi keadaan suatu kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ingin dicapai tahun 2021 - 2026 sebagaimana tersebut pada tabel T-C 28 berikut:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Predikat SAKIP pada Dinas Perikanan	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	0%	60%	62%	65%	70%	100%	100%
2	Produksi ikan tangkap (Ton/Tahun)	21.430,5 Ton	22.352,25	23.525,25	23.742,25	23.885,25	23.975,25	23.975,25
	a. Potensi/stok ikan di PUD (Kg/Ha per tahun)	157 Ekor/Ha	257	357	425	450	476	476 Ekor/Ha
	b. Jumlah produksi ikan endemik yang tidak termasuk kategori terancam langka	7 Ton	7	8	9	10	12	12 Ton
	c. Jumlah produksi ikan endemik tertentu (Belidak, Semah, Baung) (Ton)	2.856,6 Ton	2.856,7	2.856,80	2.859,90	2.857,2	2.857,4	2.857,4 Ton
	d. Angka partisipasi nelayan pada wilayah ekosistem yang menjadi lokus pemberdayaan ekonomi	10%	5	5	5	5	5	35%
	e. Jumlah Retribusi perikanan dalam jutaan	75 Juta	80	85	90	95	100	100 Juta
	f. Jumlah ikan yang di bongkar muat pada TPI per bulan dalam Ton	650 Ton	700	750	800	850	900	900 Ton
	g. Persentase Sumber Daya Ikan (SDI) yang terawasi	20 %	20	25	30	35	35	35
	h. Jumlah Pokmaswas yang aktif dalam melakukan pengawasan	22 Pokmaswas	2	2	2	2	2	10
3	Jumlah produksi ikan budidaya (Ton/tahun)	25.356	25.482	25.608	25.734	25.861	25.990	25.990 Ton
	Jumlah benih yang di produksi dalam ekor/tahun	500.000 ekortahun	875.000	1.000.000	1.025.000	1.035.000	1.050.000	1.050.000
	a Jumlah benih yang diproduksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam ekor/tahun	100.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	b Jumlah benih yang produksi UPR dan Pembudidaya Mandiri dalam jenis/macam pertahun	3	7	8	8	8	8	8
	c Jumlah produksi ikan pada kawasan budidaya air tawar (kolam, keramba/KJA, Minapadi dan kawasan terpadu) Ton/Tahun	21.430,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	d Jumlah produksi benih ikan UPT BI (dalam ekor)	400.000	425.000	450.000	475.000	485.000	500.000	500.000
	e Retribusi hasil penjualan benih (PAD) yang disetor UPT BI Kelansin	150 Juta	160	170	180	190	200	1.050 Juta
	F Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina	20	20	20	20	20	20	100
4	Jumlah hasil produksi ikan olahan (Ton per tahun)	11.359,33	11.370	12.000	12.300	12.500	13.000	13.000
	Jumlah ragam jenis produk olahan ikan yang dapat di produksi unit pengolah (jenis)	3	5	5	5	5	5	5
	a. Konsumsi Ikan/kapita/Kg/Tahun	40	40.5	50	50	50	50	50
	b. Persentase pengolah yang terdata	10	10	10	10	10	10	10

c.	Jumlah kelompok pengolah yang eksis berdiri baru sebagai kelompok pemula (cakupan bina kelompok pengolah)	4	4	4	4	4	4	20
d.	Jumlah kelompok pengolah yang berkembang dari kelompok pemula menjadi kelompok mikro	2	2	2	2	2	2	10
e.	Jumlah kelompok mikro yang berkembang dari kelompok mikro menjadi kelompok usaha kecil	2	2	2	2	2	2	10
f.	Jumlah ragam/jenis produk di pasar tradisional (jenis)	5	5	5	5	5	5	5
g.	Angka capaian pembangunan sistem logistik ikan	3	3	3	3	3	3	3



PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 ini dibuat untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan Perikanan 5 tahun ke depan guna mendukung program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.


Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan perikanan serta sebagai tolok ukur sebagaimana substansi Permendagri No. 86 Tahun 2017. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kapuas Hulu. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Perikanan Kapuas Hulu. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Harapan kami semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu serta penyelenggara pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU


**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,**
RONI JANUARDI, S. Sos., M. Si
NIP. 19650129 198603 1 009